



**KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN
DAERAH DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA:
ANALISIS KETERBATASAN KONSTITUSIONAL
BERDASARKAN UUD 1945**

SKRIPSI

*Diajukan sebagai salah satu syarat Untuk memperoleh Gelar sarjana (S1) Pada
Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri*



Oleh:

MHD. RAMADHANI

NIM: 301221010058

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDRAGIRI
TEMBILAHAN
2026**

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Universitas Islam Indragiri

SURAT PERNYATAAN

Yang Bertandatangan dibawah ini

Nama : **MHD. RAMADHANI**

Nim : 301221010058

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Kedudukan Dan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah
Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Analisis
Keterbatasan Konstitusional Berdasarkan Uud 1945

Saya Yang Menyatakan Bahwa Skripsi Ini Merupakan Hasil Karya Saya Sendiri, Tidak Dibuat Oleh Orang Lain, Juga belum pernah ditulis orang lain. Untuk Itu bila dikemudian hari Skripsi ini terbukti merupakan hasil Karya Orang lain atau hasil mencontek skripsi orang, maka saya bersedia untuk di batalkan gelar sarjana saya,

Demikian Surat pernyataan ini Di Buat dengan sebenar-benarnya dan tidak ada paksaan dari pihak mana pun.

Tembilahan, , 2026

Yang menyatakan



Mhd. Ramadhani



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Universitas Islam Indragiri



UNIVERSITAS ISLAM INDRAGIRI FAKULTAS HUKUM

Kampus Soebrantas Jalan H.R. Soebrantas Nomor : 10, Tembilahan Indragiri Hilir Propinsi Riau Indonesia
☎ 0853 6330 1314 📠 (0768) 21386 🌐 Laman website: <http://www.unisi.ac.id>

BERITA ACARA MEJA HIJAU

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri Nomor : 068/SK/UNISI/E/VII/2026 Tentang Tim Penguji Ujian *Oral Comprehensive* Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri Semester Genap T.A 2025-2026, maka pada hari ini, Kamis tanggal 23 Juli 2026 telah dilaksanakan Ujian *Oral Comprehensive* (Skripsi) Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri Program Studi Ilmu Hukum :

Nama	: MHD. RAMADHANI
NIM	: 301221010035
Judul Skripsi	: KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA
Waktu	: 08.00 - 09.00 Wib
Tempat	: Ruang Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri
Hasil	: Lulus dengan Nilai A
Keterangan	: Aman dan Tertib

Tembilahan, Agustus 2026

Tim Penguji

1. JAMRI, S.H., M.H
2. VIVI ARFIANI SIREGAR, S.H., M.H
3. SYARIFUDDIN, S.H., M.H
4. DARMIWATI, S.H., M.H
5. HERDIANSYAH, Lc., M.A

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Hukum UNISI

Dr. ALI AZHAR, S. Sos., M.H
NIPY. 1667 03 321

Kepala Prodi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum UNISI

Dr. BAMBANG SASMITA ADI PUTRA, S.H., M.H
NIPY. 2391 03 251

Ilmu Karya Abdi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Universitas Islam Indragiri

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDRAGIRI

Alamat : Jl. HR. Soebrantas No. 10 Tembilahan-Indragirihilir-,Riau

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Mhd. Ramadhani
Nim : 301221010058
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Kedudukan Dan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah
Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Analisis
Keterbatasan Konstitusional Berdasarkan Uud 1945

Tembilahan Mei,
2026

Pembimbing I

Jamri, S.H., M.H

Pembimbing II

Vivi Arfiani Siregar, S.H., M.H.

KETUA PROGRAM STUDI

Bambang Sasmita Adi Putra SH., MH



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada seluruh umat manusia termasuk kepada penulis, sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Serta tidak lupa shalawat dan salam Allahumma shalli 'ala Sayyidina Muhammad wa 'ala alihi Sayyidina Muhammad kepada Rasulullah SAW. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“Kedudukan Dan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Analisis Keterbatasan Konstitusional Berdasarkan Uud 1945”**

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan mungkin terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan, doa, dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Najamuddin, Lc., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Indragiri.
2. Bapak Dr. Ali Azhar, S.Sos., M.H. selaku Dekan dan Bapak Bambang Sasmita Adi Putra, S.H., M.H. selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri dan segenap jajarannya.
3. Bapak Jamri, SH., MH. selaku Pembimbing I dan Ibu Vivi Arfiani Siregar, S.H., M.H. selaku Pembimbing II dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

bimbingan dan nasehat-nasehat yang sangat berharga yang telah diberikan kepada penulis sehingga mampu menyusun skripsi dengan baik.

4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu dalam skripsi ini. Terima kasih atas ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan selama ini.
5. Bapak dan Ibu Staf Akademik dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri yang telah banyak membimbing dan membantu penulis selama berada di Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri.
6. Kedua orang tua tercinta saya yang telah memberikan doa restu serta dukungan moril dan materil selama ini.

Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menjadi sumbangsih kecil dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hak kekayaan intelektual.

Tembilahan, 2026

Penulis

Mhd. Ramadhani



KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA: ANALISIS KETERBATASAN KONSTITUSIONAL BERDASARKAN UUD 1945

Oleh ; Mhd Ramadhani

Pembimbing I : Jamri, SH., MH, Pembimbing II : Vivi Arfiani S, SH., M.H

ABSTRAK

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan lembaga perwakilan daerah yang dibentuk pasca perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai bagian dari penguatan sistem demokrasi dan mekanisme checks and balances dalam ketatanegaraan Indonesia. Kehadiran DPD diharapkan mampu memperjuangkan aspirasi daerah dalam proses pembentukan undang-undang serta pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Namun, dalam praktiknya kewenangan DPD masih bersifat terbatas karena ketentuan konstitusional hanya memberikan fungsi pengajuan, pertimbangan, dan pengawasan tertentu tanpa kewenangan pengambilan keputusan akhir sebagaimana dimiliki Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kondisi tersebut menimbulkan persoalan mengenai efektivitas kedudukan dan peran DPD dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan kewenangan DPD dalam proses pembentukan undang-undang dan fungsi pengawasan berdasarkan UUD 1945, mengkaji keterbatasan konstitusional yang dimiliki DPD beserta implikasinya terhadap efektivitas kelembagaan, serta merumuskan konsep ideal kewenangan DPD dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan DPD dalam sistem ketatanegaraan Indonesia belum mencerminkan prinsip bikameral yang kuat karena kewenangan legislasi dan pengawasannya masih terbatas. DPD tidak memiliki kewenangan ikut menetapkan undang-undang secara penuh, sehingga fungsi representasi daerah belum berjalan optimal. Keterbatasan konstitusional tersebut



berdampak pada lemahnya efektivitas DPD dalam memperjuangkan kepentingan daerah serta menciptakan ketimpangan relasi kelembagaan dengan DPR. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kewenangan DPD melalui reformulasi konstitusional dan legislasi agar DPD memiliki peran yang lebih signifikan dalam pembentukan undang-undang dan pengawasan pemerintahan guna mewujudkan sistem ketatanegaraan yang lebih demokratis, representatif, dan berkeadilan.

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN	i
TANDA PERSETUJUAN UJIAN	ii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	iii
BERITA ACARA MEJA HIJAU	iv
SURAT KEPUTUSAN PEMBIMBING SKRIPSI	v
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR SINGKATAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Kerangka Teori	11

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

F. Kerangka Konseptual	32
G. Metode Penelitian.....	33

BAB II TINJAUAN UMUM

A. Pengertian dan Prinsip Sistem Ketatanegaraan Indonesia	37
B. Kedudukan Lembaga-Lembaga Negara dalam UUD 1945	41
C. Latar Belakang Pembentukan Dewan Perwakilan Daerah	44
D. Perkembangan Kedudukan dan Fungsi DPD dalam Sistem Ketatanegaraan	47

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan dan kewenangan dalam proses pembentukan undang-undang dan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menurut UUD 1945.....	51
B. Keterbatasan konstitusional yang dimiliki Dewan Perwakilan Daerah serta implikasinya terhadap efektivitas fungsi dan peran DPD dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.....	77
C. Konsep ideal kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam proses pembentukan undang-undang dan fungsi pengawasan dalam sistem ketatanegaraan.....	94

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	99
B. Saran.....	100

Daftar Pustaka



DAFTAR SINGKATAN

UU : Undang-Undang
RI : Republik Indonesia
UUD: Undang-Undang Dasar
PP: Peraturan Pemerintah
Permendagri; Peraturan Menteri Dalam Negeri
Pilkades: Pemilihan Kepala Desa
Kades: Kepala Desa
BPD: Badan Permusyawaratan Desa
SH : Sarjana Hukum

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.